

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Ribuan PNS Korup Masih Terima Gaji
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.8
Edisi	: Jumat, 7 September 2018

Ribuan PNS Korup Masih Terima Gaji

JAKARTA, (GM).-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menghitung jumlah uang negara yang mengalir ke para pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang masih menerima gaji meski terlibat korupsi. Tak tanggung-tanggung, total ada sebanyak 2.357 PNS korup yang masih menerima gaji.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengaku sedang menghitung berapa gaji yang masih diterima ribuan PNS korup itu meski sudah dihukum penjara. Namun, Agus mengaku belum bisa memastikan kategori pengeluaran itu termasuk kerugian negara atau tidak.

Yang pasti, indikasi pelanggaran dari hal tersebut tengah dicermati KPK. "Teman-teman masih menghitung itu. Nanti kita lihat," ucap Agus.

Di sisi lain, ketika PNS terjerat korupsi memang tidak langsung diberhentikan sebelum putusan hukumannya berkekuatan hukum tetap (inkrah) dengan masa hukuman minimal dua tahun penjara. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan begitu, mereka pun masih mendapatkan gaji meski sebenarnya rekening mereka telah diblokir.

"Sepanjang belum diberhentikan, semua PNS berhak atas gaji," ucap Ka

Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, Kamis (6/9).

Ridwan mengungkapkan kisaran uang yang harus dikeluarkan negara untuk menggaji para PNS korup itu. "Gajinya beda-beda, saya tidak bisa beri gambaran rinci," katanya.

"Tapi kalau mau ambil perkiraan kasar, kira-kira rata-rata Rp 10 juta dikali 2.357 orang sama dengan Rp 23,57 miliar per bulan. Angka yang fantastik," sambung Ridwan.

Hitungan itu hanya perkiraan kasar saja. Untuk lebih jelasnya, Ridwan mempersilakan BPK untuk turun tangan. "Angka tepatnya hanya bisa dihitung oleh BPK," ucap Ridwan.

Lebih lanjut ia menyatakan, BKN sebelumnya telah bersama KPK dan Kemendagri serta Kemenpan-RB untuk mengatasi masalah ini. Ribuan PNS itu diminta untuk segera diberhentikan tidak hormat.

Tentukan nasib

BKN sebenarnya sudah menyambangi KPK untuk membahas hal tersebut bersama Kemendagri serta Kemenpan-RB. Imbauan agar para PNS korup yang putusannya telah inkrah segera dipecat sudah disampaikan.

"Ini sebenarnya BKN tidak dalam kapasitas memaksa PPK (pejabat pembina kepegawaian) pusat/daerah. Kami hanya mengingatkan mereka akan

kewenangan yang mereka miliki. Tapi hati-hati, jika tidak dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat, KPK akan masuk bersama Kemenpan-RB dan Kemendagri," tutur Ridwan.

Tentang angka total 2.357 PNS korup masih menerima gaji sebelumnya disampaikan Kepala BKN Bima Hari Wibisana di KPK. Ia awalnya mengatakan ada 2.674 PNS yang putusannya telah inkrah, tapi baru 317 orang yang diberhentikan tidak hormat.

Sementara itu, pemerintah akan segera menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas nasib 2.674 PNS yang telah terbukti korupsi. Rakor digelar Kemendagri, Kemenpan RB, dan pihak terkait lainnya.

"Iya itu akan segera dirakorkan Mendagri, kelihatannya Senin," ujar MenPAN-RB Syafruddin di Kantor Wapres, Jln. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/9).

Syafruddin enggan berkomentar lebih jauh apakah 2.674 ASN tersebut akan dipecat. Namun, dia memastikan pemerintah akan mengambil keputusan tegas saat rapat. "Ya nanti dilihat kan, enggak boleh satu pihak, karena itu menyangkut banyak pihak," katanya.

Pemerintah juga akan mengecek kembali status 2.674 ASN tersebut di rapat koordinasi. "Iya nanti di rakor itu akan kita cek," tuturnya. (dte)**